



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DESA KERJASAN MENJADI KELURAHAN KERJASAN  
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usul dan prakarsa masyarakat Desa Kerjasan mengenai perubahan desa menjadi kelurahan, dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, potensi desa, tersedianya sarana dan prasarana, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna, Pemerintah Desa Kerjasan telah mengusulkan perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa usulan perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 57) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
dan  
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN DESA KERJASAN MENJADI KELURAHAN KERJASAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
7. Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kudus.
8. Perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan adalah tindakan mengubah Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan yang didasarkan atas persyaratan yang ditentukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Kerjasan.
9. Batas Kelurahan Kerjasan adalah tanda pemisah Kelurahan Kerjasan dengan Desa atau Kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.

## BAB II

### PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

#### Bagian Pertama Umum

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, diadakan Perubahan Desa Kerjasan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus menjadi Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat.

#### Bagian Ketiga Nama, Luas, Batas Wilayah dan Peta

##### Pasal 4

Nama baru Desa Kerjasan sebagai akibat perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah Kelurahan Kerjasan.

## Pasal 5

Luas Wilayah Kelurahan Kerjasan sebagai akibat perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah  $\pm$  10,364 (sepuluh koma tiga enam empat) hektar.

## Pasal 6

Batas Wilayah Kelurahan Kerjasan sebagai akibat perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Bakalankrapyak dan Kelurahan Kajeksan ;
- b. Sebelah Timur : Desa Langgardalem, Kelurahan Kajeksan, dan Desa Demangan ;
- c. Sebelah Selatan : Desa Demangan, Desa Kauman, dan Desa Damaran ;
- d. Sebelah Barat : Desa Damaran, Desa Kauman, dan Desa Janggalan.

## Pasal 7

Penetapan dan pemasangan tanda batas Kelurahan Kerjasan sebagaimana dimaksud Pasal 6, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 8

Batas Wilayah dan Peta Kelurahan Kerjasan adalah sama dengan batas wilayah dan Peta Desa Kerjasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Penduduk

## Pasal 9

Penduduk Kelurahan Kerjasan adalah penduduk Desa Kerjasan yang berubah menjadi Kelurahan Kerjasan.

Bagian Kelima  
Perubahan Inventaris Kekayaan

## Pasal 10

Sebagai akibat perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan, maka Inventaris Kekayaan Desa Kerjasan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, menjadi kekayaan milik Daerah dan selanjutnya dikelola oleh Kelurahan Kerjasan.

Bagian Keenam  
Status Kepegawaian

## Pasal 11

Dengan berubahnya status Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan, maka Bupati berwenang mengangkat kepala kelurahan dan perangkat kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Dengan berubahnya status Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan, maka kepala desa dan perangkat desa diberhentikan oleh Bupati untuk selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Honorer Daerah.

Bagian Ketujuh  
Organisasi dan Tata Kerja

## Pasal 13

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kerjasan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Kewenangan

## Pasal 14

Dengan berubahnya Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan, maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Dalam hal kepala kelurahan dan perangkat kelurahan belum diangkat, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa Kerjasan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Kerjasan.

## Pasal 16

- (1) Keberadaan Badan Perwakilan Desa Kerjasan dengan adanya perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan dinyatakan bubar dan seluruh anggota Badan Perwakilan Desa Kerjasan diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 17

Biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sebelum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus berasal dari pendapatan desa.

## Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat hukum dari perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

Ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 22 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**NOMOR 6 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN DESA KERJASAN MENJADI KELURAHAN KERJASAN**  
**KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004, bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain kelurahan yang ada dapat dibentuk kelurahan baru dengan cara penggabungan, pemecahan dan perubahan dari desa menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Bagi desa yang statusnya diubah menjadi kelurahan, pengelolaan sumber pendapatan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara desa dan kelurahan lain yang ada di Kabupaten.

Perubahan status Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan didasarkan pada prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004. Atas usul tersebut, diadakan penelitian administrasi dan penilaian di lapangan oleh Tim Pertimbangan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa / Kelurahan di Kabupaten Kudus yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 4 Pebruari 2004 Nomor 146.1/257/2004. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim tersebut, maka Desa Kerjasan memenuhi persyaratan untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan Kerjasan.

Dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

- Pasal 5 : Luas wilayah Kelurahan Kerjasan tersebut sama dengan luas wilayah Desa Kerjasan yang berubah menjadi Kelurahan Kerjasan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Dengan adanya perubahan status Desa Kerjasan menjadi Kelurahan Kerjasan, maka berkenaan dengan keberadaan sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat-surat berharga lainnya dinyatakan masih tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 65